



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

2025-2029



RENSTRA 2025-2029

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA



kec-utara.pekalongankota.go.id



[KecutaraOfficial](https://www.facebook.com/KecutaraOfficial)



[kecamatanutara89](https://www.instagram.com/kecamatanutara89)



[@kecamatanpekalonganutara](https://www.youtube.com/@kecamatanpekalonganutara)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan guna mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan serta memperhatikan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan harapan dapat menghadirkan kebijakan strategis yang tepat guna dan berdaya guna dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tingkat kecamatan.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam dokumen Renstra ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan Renstra 2025 – 2029 ini. Kami berharap bahwa Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik itu kalangan eksekutif maupun legislatif dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kota Pekalongan pada umumnya dan Kecamatan Pekalongan Utara pada khususnya.

Pekalongan, 19 September 2025

CAMAT PEKALONGAN UTARA
KECAMATAN PEKALONGAN



WISMO ADITIYO, S.Pt, MT
NIP.19710926 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	34
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan	35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	35
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.2.2 Isu Strategis	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	46
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029	47
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	50
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam	52

Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
4.1 Uraian Program	57
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	59
4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan	85
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	85
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	86
4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	86
4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi	86
BAB V PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	28
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	
Tabel II-2	28
Komposisi Pegawai Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan	
Tabel II-3	29
Prasarana dan Sarana Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025	
Tabel II-4	33
Pencapaian Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	
Tabel II.5	34
Pencapaian Realisasi Keuangan Kecamatan Pekalongan Kota Pekalongan	
Tabel II.6	46
Isu Strategis PD	
Tabel III-1	49
Tujuan dan Sasaran Renstra PD	
Tabel III-2	51
Strategi Renstra PD	
Tabel III-3	55
Arah Kebijakan Renstra PD	
Tabel IV-1	60
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	
Tabel IV-2	81
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	
Tabel IV-3	85
Indikator Utama Pembangunan	
Tabel IV-4	85
Indikator Kinerja Utama PD	
Tabel IV-5	86
Indikator Kinerja Kunci	
Tabel IV-6	86
Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
Tabel IV-7	86
Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan dan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010	7
Gambar II-1 Struktur Organisasi Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	16
Gambar II-2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Selanjutnya Pemerintah Kota Pekalongan pada tanggal 20 Agustus 2025 telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.

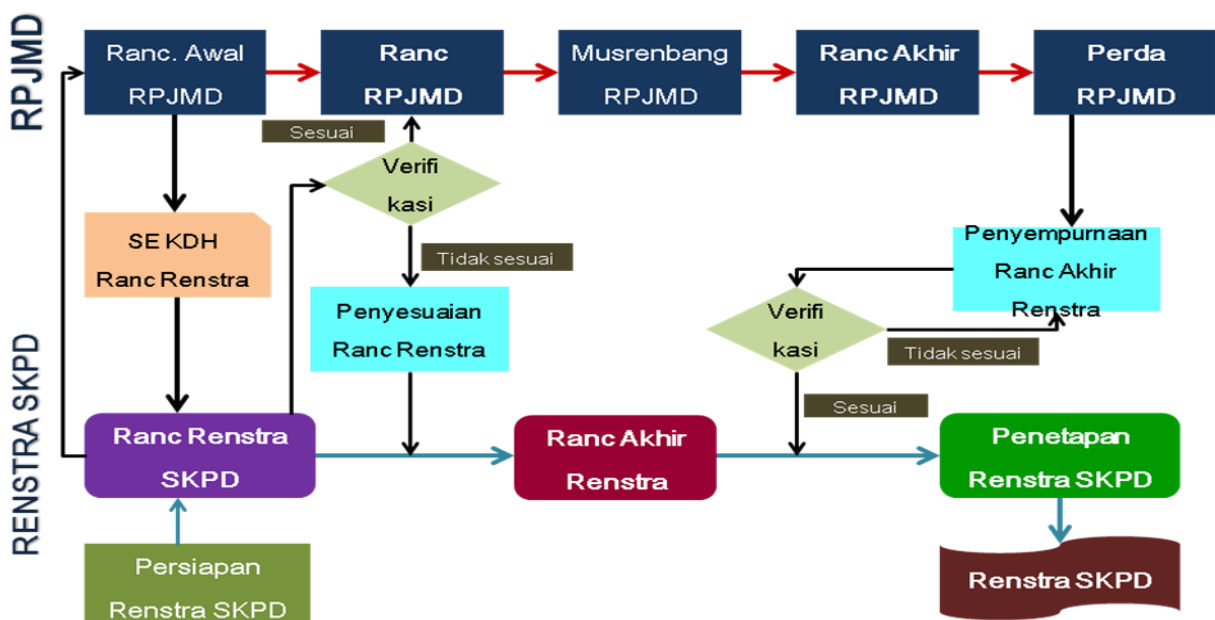
Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara sebagai pendukung Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun ke depan, serta

merupakan bagian kontrak kerja Camat Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, yang dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar I-1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
 19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
 20. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Lingkup Kerja dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
 21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang
 22. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
 23. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1.3.1 Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2025 - 2029, serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja Camat Pekalongan Utara Kota Pekalongan

yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Wali kota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kota Pekalongan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Tugas fungsi dan struktur Perangkat Daerah

- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari:
- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029, Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mendukung renstra Kementrian dan Renstra Provinsi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan berpedoman pada norma dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang meliputi keserasian, kemanfaatan, keluwesan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan – pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah Kota Pekalongan memiliki variasi tugas yang meliputi 3 bidang kegiatan yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga design organisasi yang dikembangkan harus dapat mengakomodasi seluruh pelaksanaan kegiatan ketiga bidang tersebut di atas. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota No 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan memiliki tugas ***“Mendukung Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan”***.

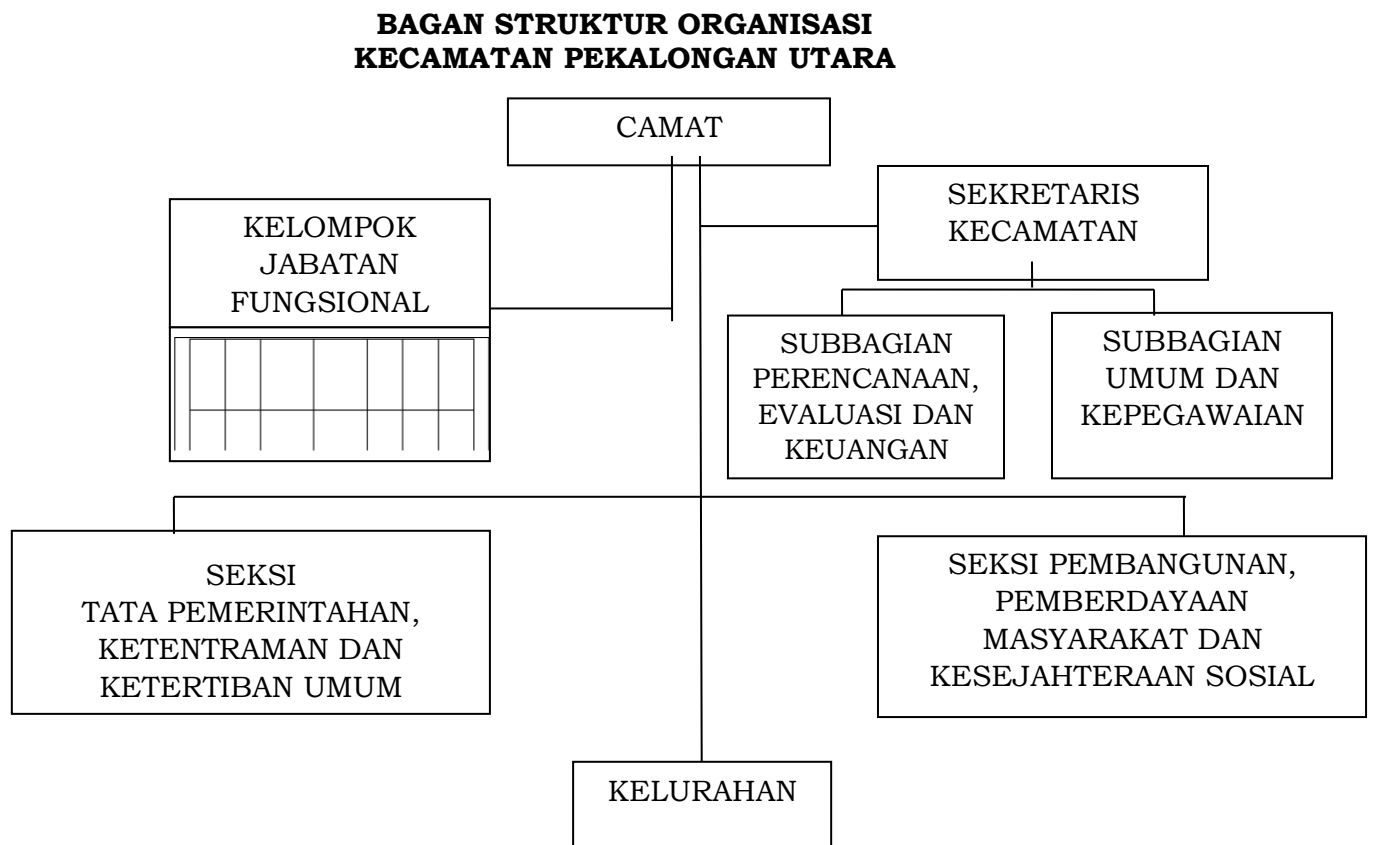
Sedangkan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara di jabarkan sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
2. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
3. Pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
8. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
11. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
12. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
13. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

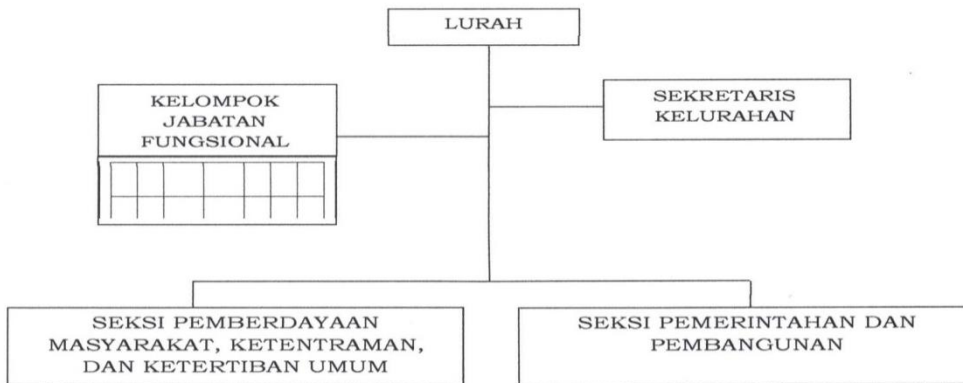
- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
- e. Kelurahan terdiri atas:
 - 1. Lurah;
 - 2. Sekretariat Kelurahan;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
 - 4. Seksi Pemerintahan
- f. Jabatan fungsional

Gambar II.1
Struktur Organisasi Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan



Gambar II.2
Struktur Organisasi Kelurahan
di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

**BAGAN STRUKTUR KELURAHAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**



Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut di atas sebagai penjabarannya sebagai berikut

A. Camat

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- b. perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
- k. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan. Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan Fungsi :

- 1. perumusan sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan;
- 2. pengoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
- 3. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan.

4. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
5. pembinaan pengelolaan administrasi umum Kecamatan;
6. pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
7. pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
8. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah Kecamatan;
9. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Kecamatan;
10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
11. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
12. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan;
13. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.

C. Kepala Sub Bagian Renval dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- c. mengoordinasikan penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan

capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan;

- d. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
- h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

D. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundangundangan;
- c. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- d. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;

- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya.
- i. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan mengevaluasi dan
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan

E. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
2. menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;

3. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
6. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
7. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
8. melaksanakan upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
9. melaksanakan fasilitasi bantuan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial;
10. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
11. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

F. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan

masyarakat;

- c. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dengan POLRI, TNI, dan/atau instansi terkait di wilayah Kecamatan;
- h. mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya

H. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan program kerja Kelurahan;
- b. menyusun kebijakan pemerintahan Kelurahan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan kesekretariatan di Kelurahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- h. mengoordinasikan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- i. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan tugas.

I. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan sasaran, program, dan kegiatan Kelurahan;
- b. menyusun bahan kebijakan Kelurahan;

- c. melaksanakan evaluasi kinerja Kelurahan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan peralatan rumah tangga;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan logistik kantor;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

- q. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip;
- r. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional

J. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- f. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

K. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan

Seksi Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;

- b. menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunansarana prasarana;
- c. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan rutin langsung kepada masyarakat;
- e. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- f. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- g. melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;
- h. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

L. Kelompok Jabatan Fungsional di Kelurahan

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan dengan pelaksanaan tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sampai dengan Agustus 2025 berjumlah 64 orang ASN dan 30 Non ASN sebagaimana di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
1	Kecamatan Pekalongan Utara	-	4	2	6	3	-	9	6	15
2	Kelurahan Kandang Panjang	-	4	-	3	-	-	2	5	7
3	Kelurahan Panjang Wetan	-	2	2	3	-	-	6	1	7
4	Kelurahan Degayu	-	4	1	3	-	-	4	4	8
5	Kelurahan Bandengan	-	3	1	3	-	-	5	2	7
6	Kelurahan Krapyak	1	3	3	1	-	-	4	4	8
7	Kelurahan Padukuhan Kraton	-	3	0	2	1	-	4	2	6
8	Kelutran Panjang Baru	-	2	1	3	-	-	4	2	6
TOTAL		1	25	10	24	4		38	26	64

Sumber: Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Agustus 2025

Tabel II-2
Komposisi Pegawai Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	Kecamatan Pekalongan Utara	4	6	2	3	13	28
2	Kelurahan Kandang Panjang	1	5	0	1	2	9
3	Kelurahan Panjang Wetan	1	5	0	1	2	9
4	Kelurahan Degayu	1	6	0	1	2	10
5	Kelurahan Bandengan	1	5	0	1	2	9
6	Kelurahan Krapyak	2	5	0	1	2	10
7	Kelurahan Padukuhan Kraton	1	4	0	1	4	10
8	Kelutran Panjang Baru	0	5	0	1	3	9
TOTAL		11	41	2	10	30	64

Sumber: Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Agustus 2025

B. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu

ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel II-3
Prasarana dan Sarana Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA			
1	Perahu PE	1	unit
2	Mesin Absen	3	unit
3	Lemari	18	unit
4	Lemari Es	2	unit
5	Filling Cabinet	8	unit
6	Meja Kerja	17	unit
7	Meja Rapat	4	unit
8	Kursi Kerja	26	unit
9	Kursi Rapat	63	unit
10	CCTV	2	unit
11	Alat Penghancur Kertas	3	unit
12	Mesin Potong Rumput	1	unit
13	AC	12	unit
14	Kipas Angin	8	unit
15	TV	1	unit
16	Sound System	4	unit
17	Dispenser	1	unit
18	Tangga Alumunium	1	unit
19	Projector	2	unit
20	Pompa Air	3	unit
21	Sofa	2	unit
22	Scanner	2	unit
KELURAHAN DEGAYU			
1	Motor	5	unit
2	Mesin Absen	2	unit
3	Lemari	8	unit
4	Filling Cabinet	9	unit
5	Meja Kerja	22	unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
6	Kursi Kerja	16	unit
7	Kursi Rapat	20	unit
8	Sofa	1	unit
9	Kipas Angin	3	unit
10	Sound System	2	unit
11	PC Unit	6	unit
12	Laptop	4	unit
13	Printer	5	unit
14	Scanner	1	unit
KELURAHAN KRAPYAK			
1	Motor	3	unit
2	Lemari	9	unit
3	Filling Cabinet	4	unit
4	Mesin Absen	2	unit
5	Kursi Rapat	16	unit
6	Kursi Kerja	10	unit
7	Sofa	2	unit
8	Meja Kerja	10	unit
9	Kipas Angin	9	unit
10	Sound System	3	unit
11	Dispenser	2	unit
12	PC Unit	5	unit
13	Laptop	4	unit
14	Printer	9	unit
15	Scanner	1	unit
KELURAHAN KANDANG PANJANG			
1	Motor	3	unit
2	Lemari	10	unit
3	Filling Cabinet	3	unit
4	Mesin Absen	2	unit
5	Kursi Kerja	7	unit
6	Meja Kerja	5	unit
7	Mesin Potong Rumput	4	unit
8	Kipas Angin	3	unit
9	Sound System	3	unit
10	Projector	2	unit
11	PC Unit	4	unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
12	Laptop	5	unit
13	Printer	4	unit
14	Scanner	1	unit
KELURAHAN PANJANG WETAN			
1	Motor	6	unit
2	Kendaraan Roda 3	1	unit
3	Lemari	5	unit
4	Filling Cabinet	4	unit
5	Mesin Absen	2	unit
6	Kursi Kerja	10	unit
7	Kursi Rapat	12	unit
8	Meja Kerja	12	unit
9	Kipas Angin	10	unit
10	Tangga Alumunium	1	unit
11	Projector	1	unit
12	PC Unit	3	unit
13	Laptop	6	unit
14	Printer	7	unit
15	Scanner	1	unit
KELURAHAN PANJANG BARU			
1	Motor	4	unit
2	Kendaraan Roda 3	1	unit
3	Lemari	4	unit
4	Filling Cabinet	8	unit
5	Mesin Absen	2	unit
6	Kipas Angin	9	unit
7	Sound System	1	unit
8	Meja Kerja	13	unit
9	Kursi Kerja	1	unit
10	Preojector	1	unit
11	PC Unit	5	unit
12	Laptop	7	unit
13	Scanner	3	unit
14	Printer	2	unit
KELURAHAN BANDENGAN			
1	Motor	3	unit
2	Kendaraan Roda 3	1	unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
3	Lemari	7	unit
4	Mesin Absen	2	unit
5	Projector	2	unit
6	Kursi Kerja	10	unit
7	Meja Kerja	5	unit
8	Meja Rapat	4	unit
9	Lemari Es	1	unit
10	Kipas Angin	4	unit
11	Sound System	1	unit
12	PC Unit	4	unit
13	Laptop	3	unit
14	Scanner	1	unit
15	Printer	3	unit
KELURAHAN PADUKUHAN KRATON			
1	Motor	3	unit
2	Lemari	14	unit
3	Filling Cabinet	5	unit
4	Mesin Absen	2	unit
5	Projector	1	unit
6	Meja Kerja	27	unit
7	Kursi Kerja	29	unit
8	Kursi Rapat	73	unit
9	AC	2	unit
10	Kipas Angin	10	unit
11	TV	3	unit
12	Sound System	1	unit
13	Projector	1	unit
14	PC Unit	5	unit
15	Laptop	5	unit
16	Scanner	2	unit
17	Printer	6	unit

Sumber: Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 1 Tahun 2025, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Kecamatan Pekalongan Utara lima tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel II-4
Pencapaian Kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra Bappeda Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Nilai SAKIP OPD			√	Nilai	72,50	75,00	74,00	75,50	75,50	70,04	71,43	73,65	74,30	76,10	96,6	95,24	97,54	98,4	100,79
a.	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah		√		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b.	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		√		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu 2020-2024, kinerja keuangan Kecamatan Pekalongan Utara ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II.5
Pencapaian Realisasi Keuangan Kecamatan Pekalongan Kota Pekalongan

NO	Indikator Belanja Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Reali-sasi
A	Belanja Langsung																	
1	Belanja Pegawai	7.354.411.000	6.935.324.000	7.316.821.000	7.011.987.000	7.663.551.000	6.831.066.957	6.422.709.414	6.849.062.776	6.739.017.397,00	7.118.473.348	92,88	92,61	93,61	96,11	92,89	1,00 %	1,00 %
2	Belanja Barang/Jasa	803.163.000	918.148.000	1.922.168.000	2.072.740.000	2.227.989.000	762.373.566	833.288.690	1.837.517.244	1.993.178.864,00	2.138.454.702	94,92	90,76	95,60	96,16	95,98	29 %	29 %
3	Belanja Modal	254.100.000	37.560.000	509.432.000	807.349.000	911.188.000	243.111.000	34.634.000	307.847.000	765.358.000,00	897.425.000	95,68	92,21	60,43	94,80	98,49	37,6 %	38,6 %

2.1.5 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pekalongan Utara meliputi:

- a. Internal kecamatan yang terdiri dari Tenaga ASN dan Non ASN Kecamatan Pekalongan Utara
- b. Forkopimca Kecamatan Pekalongan Utara
- c. Kelurahan se Kecamatan Pekalongan Utara
- d. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pekalongan Utara sebagai pelaksana teknis kewilayahan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas mendukung Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas dan peranannya tersebut terdapat hambatan yang menjadi permasalahan dalam pencapaian tujuan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat lokal, pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Utara masih menghadapi sejumlah tantangan sistemik yang berdampak pada kualitas layanan administrasi kepada masyarakat. Permasalahan ini bersifat multidimensional dan melibatkan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, serta mekanisme tata kelola yang belum optimal. Hambatan yang menjadi permasalahan pelayanan di Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya inovasi *SiLancar* dalam mendukung pelayanan publik

Pelaksanaan inovasi *Silancar* di Kecamatan Pekalongan Utara merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal kecepatan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian serius agar tujuan dari inovasi ini dapat tercapai secara optimal.

Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman dan literasi digital masyarakat, terutama di kalangan lanjut usia dan masyarakat berpendidikan rendah. Karena sebagian besar layanan *Silancar* berbasis digital dan menggunakan aplikasi atau media sosial, masih banyak warga yang merasa kesulitan mengakses atau memahami prosedur layanan tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan inovatif yang telah disediakan.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung, seperti jaringan internet yang belum merata dan perangkat teknologi yang kurang memadai di beberapa kelurahan, juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan layanan secara cepat dan responsif. Kondisi ini berpengaruh pada keterlambatan dalam merespon pengaduan atau permintaan layanan dari masyarakat.

Dari sisi internal, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang IT menjadi hambatan tersendiri. Tidak semua aparatur kecamatan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem digital yang digunakan dalam *Silancar*. Akibatnya, proses pelayanan terkadang masih dilakukan secara manual atau mengalami keterlambatan karena harus menunggu petugas tertentu yang memahami sistem tersebut.

Selain itu, kurangnya koordinasi lintas sektor dan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam penanganan layanan berbasis *Silancar* juga menyebabkan inkonsistensi dalam

pemberian layanan di lapangan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa layanan tidak berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

2. Keterbatasan Kapasitas SDM Pelayanan

Analisis terhadap struktur organisasi dan kapasitas pegawai menunjukkan bahwa:

- Masih terdapat kesenjangan kompetensi dalam hal penguasaan teknologi informasi dan pemahaman terhadap prinsip pelayanan prima.
- Minimnya pelatihan teknis dan *capacity building* terkait prinsip pelayanan prima berdampak pada menurunnya produktivitas dan akurasi layanan.

3. Infrastruktur Pelayanan yang Kurang Memadai

Fasilitas pelayanan publik, seperti ruang tunggu, meja pelayanan, papan informasi, dan sarana bagi disabilitas masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya. Kondisi ini menghambat prinsip aksesibilitas dan kenyamanan pelayanan publik yang inklusif.

4. Kurangnya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu indikator penting dalam kualitas pelayanan publik adalah transparansi dan partisipasi. Namun dalam praktiknya:

- Informasi terkait prosedur, persyaratan, dan waktu layanan belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
- Mekanisme *feedback* dan pengaduan belum termanfaatkan secara optimal.

5. Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Kebijakan

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat administratif tidak memiliki kewenangan anggaran secara langsung, sehingga bergantung pada alokasi dari pemerintah kota. Dalam banyak kasus:

- Prioritas anggaran lebih difokuskan pada pembangunan fisik dan penanggulangan dampak bencana (seperti banjir rob), bukan peningkatan kualitas pelayanan.

- Inovasi pelayanan publik tidak masuk dalam program prioritas karena keterbatasan anggaran operasional dan kelembagaan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Kualitas Layanan Publik yang Belum Optimal di Tingkat Kecamatan

Pelayanan publik di Kecamatan Pekalongan Utara masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung pada kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Meskipun secara umum infrastruktur pelayanan telah tersedia, namun kualitas layanan yang diberikan belum sepenuhnya optimal.

Salah satu isu utama adalah penanganan pengaduan masyarakat yang kurang optimal. Berdasarkan evaluasi internal, mayoritas masyarakat menilai bahwa kanal pengaduan yang tersedia belum berjalan secara efektif dan belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, kompetensi aparatur pelayanan juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas layanan. Kurangnya pelatihan berkelanjutan serta keterbatasan sumber daya manusia membuat

beberapa layanan administratif dan sosial berjalan lambat atau tidak efisien.

Di sisi lain, upaya digitalisasi layanan publik juga belum sepenuhnya terimplementasi secara merata dan terintegrasi. Meskipun sudah ada sistem e-government, namun penggunaannya masih terbatas karena SDM aparatur pengelola layanan publik sering berganti dan ada kesenjangan digital diantara SDM aparatur.

Kurangnya sosialisasi mengenai layanan publik yang tersedia juga turut mempengaruhi kondisi ini. Banyak warga yang belum memahami prosedur, hak, dan kewajiban mereka sebagai pengguna layanan publik, sehingga memunculkan kesalahan persepsi terhadap pemerintah kecamatan.

Secara keseluruhan, permasalahan ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal:

- Peningkatan kapasitas aparatur,
- Perbaikan sistem pengaduan,
- Digitalisasi dan integrasi layanan,
- Serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi publik.

Tanpa pembenahan menyeluruh, pelayanan publik yang kurang optimal ini berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat, memperbesar ketimpangan akses layanan, dan memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di tingkat kecamatan.

2. Keamanan dan Ketertiban di wilayah Utara

Keamanan dan ketertiban wilayah merupakan isu strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di Kecamatan Pekalongan Utara. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis pesisir dengan kepadatan penduduk yang tinggi, serta tingkat mobilitas masyarakat yang cukup dinamis. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), baik yang bersifat sosial, lingkungan, maupun ekonomi.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kondisi aktual, beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban wilayah antara lain:

- Meningkatnya kasus kenakalan remaja, perkelahian antar kelompok, dan potensi konflik sosial.
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Minimnya sarana dan prasarana pendukung keamanan di lingkungan permukiman padat penduduk.
- Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri, seperti kegiatan siskamling.
- Kerentanan wilayah terhadap bencana banjir rob atau cuaca ekstrem yang dapat memicu keresahan sosial.

Isu strategis ini menuntut penanganan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui kebijakan dan program yang berbasis pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat deteksi dan respon terhadap potensi gangguan keamanan.

3. Tingginya Resiko Bencana Banjir Rob dan Penurunan Muka Tanah

Banjir rob yang bersifat kronis menjadi tantangan utama di Kecamatan Pekalongan Utara. Sebagian besar wilayahnya tergenang secara rutin, mengganggu aktivitas warga, merusak infrastruktur, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena penurunan muka tanah (*land subsidence*) dan kurangnya sistem drainase yang memadai. Penanganan banjir dan rob menjadi isu strategis utama karena berdampak langsung terhadap berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

4. Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Penurunan Kualitas Lingkungan

Permasalahan sampah menjadi salah satu isu strategis yang menonjol di Kecamatan Pekalongan Utara. Sebagai kawasan pesisir

yang padat penduduk serta memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, seperti perikanan, perdagangan, dan industri rumahan (batik), volume sampah yang dihasilkan setiap harinya cukup besar. Namun, sistem pengelolaan sampah di wilayah utara masih belum optimal, baik dari sisi infrastruktur, pengangkutan, maupun kesadaran masyarakat.

Penutupan TPA Degayu pada Maret 2025 menambah kompleksitas situasi, karena kapasitas pengelolaan sampah terbatas. Sebagai respons, Pemkot Pekalongan menetapkan status darurat sampah selama enam bulan dan membangun dua TPS-3R di Padukuhan Kraton dan Rusunawa Panjang Baru.

Namun, tantangan utama tetap pada perilaku masyarakat. Meski fasilitas telah disediakan, sebagian warga masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah masih rendah. Sebagian besar sampah belum dikelola dengan baik, menyebabkan penumpukan di TPA dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat fasilitas dan edukasi, sementara masyarakat diharapkan aktif dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya. Dengan langkah bersama, diharapkan lingkungan di Kecamatan Pekalongan Utara dapat terjaga kebersihannya.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan berbagai dampak serius, seperti pencemaran lingkungan, penyumbatan drainase yang memicu banjir, serta munculnya gangguan kesehatan masyarakat. Di kawasan pesisir, sampah plastik juga mencemari laut dan merusak ekosistem pesisir yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat.

Secara strategis, permasalahan sampah di Pekalongan Utara tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi masyarakat, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Penanganan isu sampah harus menjadi prioritas dalam perencanaan

pembangunan wilayah, karena berdampak langsung pada kualitas lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan hidup masyarakat.

5. Permasalahan Stunting di Wilayah Utara

Stunting atau gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi isu strategis yang signifikan di Kecamatan Pekalongan Utara. Tingginya angka stunting di wilayah ini menunjukkan adanya permasalahan multidimensional yang meliputi aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya prevalensi stunting di Kecamatan Pekalongan Utara antara lain adalah rendahnya tingkat pemahaman keluarga terhadap pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti sanitasi yang buruk dan tingginya risiko banjir rob yang menyebabkan penyebaran penyakit.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi keluarga yang sebagian besar berada pada kelompok rentan juga mempengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhan gizi anak secara optimal. Rendahnya pendapatan dan kurangnya edukasi gizi berdampak langsung pada kualitas makanan dan pola asuh anak, sehingga meningkatkan risiko stunting.

Permasalahan stunting ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan kecamatan, karena dampak jangka panjangnya dapat menghambat kualitas sumber daya manusia, menurunkan produktivitas, dan memperbesar beban sosial ekonomi di masa depan.

Oleh karena itu, penanganan stunting harus menjadi prioritas melalui intervensi terpadu yang melibatkan berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan, dengan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan komunitas, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta perbaikan kondisi lingkungan permukiman.

Untuk membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan stunting maka diperlukan data *antropometri* yang selalu dilaporkan secara rutin. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat sebuah sistem pelaporan dan analisis digital yang di beri nama *Digital Analysis Z-Score Status Gizi dan Kontrol Stunting (DIGIZTUNT)*. Inovasi ini melibatkan *stakeholders* terkait yaitu kader posyandu, puskesmas, kelurahan, kecamatan dan penyuluh keluarga berencana.

6. Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Utara

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Namun, di Kecamatan Pekalongan Utara, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih bersifat formalitas. Hal ini menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat partisipasi aktif warga sangat penting dalam memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan permasalahan riil di tingkat akar rumput.

Beberapa permasalahan yang mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat antara lain:

- Dominasi kelompok tertentu dalam forum perencanaan, sehingga aspirasi masyarakat marjinal seperti perempuan, penyandang disabilitas, nelayan kecil, dan warga miskin sering tidak terakomodasi secara memadai.
- Kurangnya mekanisme konsultasi dan dialog yang partisipatif, seperti forum warga atau musyawarah tematik berbasis isu, yang membuat proses perencanaan cenderung *top-down*.
- Kelemahan kapasitas masyarakat dalam menyusun usulan program atau kegiatan yang sesuai prioritas pembangunan, akibat keterbatasan literasi perencanaan dan lemahnya pendampingan dari pemerintah.

Kondisi ini menyebabkan adanya ketimpangan antara perencanaan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat, yang berdampak pada rendahnya efektivitas program, lemahnya rasa memiliki (*ownership*), dan minimnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel II.6
Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Optimalisasi kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan	Belum optimalnya pelayanan publik di wilayah kecamatan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta terbatasnya sarana dan prasarana, serta anggaran	Kapasitas dan Kompetensi sumber daya manusia (SDM) perlu di tingkatkan karena sangat berpengaruh terhadap kecepatan, ketetapan dan transparansi layanan.	Kualitas dan efektifitas layanan publik yang mencakup standar pelayanan minimal, evaluasi kepuasan masyarakat, dan reformasi birokrasi.	Birokrasi yang rumit. Proses pelayanan publik yang kompleks dan berbelit – belit dapat menghambat efesiensi dan efektifitas pelayanan	Reformasi birokrasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik	Kualitas pelayanan publik yang belum optimal di wilayah kecamatan
Optimalisasi aspek keamanan dan ketertiban wilayah	Belum optimalnya keamanan dan ketertiban di wilayah utara yang disebabkan oleh Lemahnya pengawasan dan aturan lokal, minim pembinaan dan insentif	Terjadinya gangguan ketertiban di lingkungan permukiman, yang meliputi konflik antarwarga, parkir liar, hingga aktivitas sosial yang mengganggu ketenangan umum.	Meningkatnya kerentanan sosial di kawasan urban dan pesisir akibat tekanan lingkungan, ekonomi, dan demografi	Penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta pembangunan kewilayahan yang berkeadilan sebagai prioritas nasional	Meningkatnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berkaitan erat dengan tekanan sosial, perubahan lingkungan, serta pertumbuhan wilayah yang tidak terkontrol.	Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Utara
Optimalisasi aspek fisik dan lingkungan	Krisis lingkungan dan sosial akibat bencana banjir rob	Krisis Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Ketidakpastian Hidup di Zona Rob	Keadilan Iklim dan Ketimpangan Global	Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pesisir	Meningkatnya Risiko Bencana Rob dan Penurunan Muka Tanah di Wilayah Pesisir	Tingginya Resiko Bencana Banjir Rob dan Penurunan Muka Tanah

					Utara Jawa (Pantura),	
Optimalisasi aspek fisik dan lingkungan	Masih banyaknya masalah lingkungan seperti kawasan kumuh, pengelolaan sampah	Penanganan sampah di kecamatan yang masih menjadi isu darurat sampah, minimnya ruang terbuka hijau	Penanganan aspek fisik dan lingkungan meliputi pemanasan global, perubahan iklim, yang belum optimal	Pembangunan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, dan mitigasi dampak lingkungan belum kasimal	Penggunaan dan pemanfaatan lahan yang belum optimal	Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Penurunan Kualitas Lingkungan
Optimalisasi aspek kesehatan masyarakat	Masih banyaknya angka stunting di wilayah utara	Integrasi prinsip keadilan lingkungan dalam perencanaan pembangunan, terutama bagi kelompok rentan (balita, ibu hamil, miskin ekstrem).	Stunting merupakan masalah gizi global yang mempengaruhi jutaan anak di seluruh dunia dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat	Stunting merupakan masalah prioritas nasional di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama terutama pada seribu hari pertama kehidupan	Prevalensi Stunting di Wilayah Pantura Jawa Tengah masih Tinggi	Permasalahan Stunting di Wilayah Utara
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi, kurangnya transparansi, keterbatasan kapasitas masyarakat dan kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif.	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terwakili	Mengembangkan strategi partisipasi yang menyeluruh dan efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Minimnya partisipasi yang bermakna (meaningful participation), seringkali partisipasi masyarakat bersifat formalitas dan tidak substantif	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah utara

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Tingkat Kecamatan”**.. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, yaitu menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang

diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten dalam menerapkan hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian, evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pekalongan dapat tercapai

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan menetapkan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029 yaitu :

- a. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 – 2029 dijelaskan pada Tabel III-1 sebagaimana berikut.

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya sistem birokrasi yang efektif, akuntabel, inovatif dan pelayanan publik berbasis digital	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Tingkat Kecamatan		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan Pekalongan Utara	Indeks	94,71	94,81	94,91	95,01	95,11	95,21	95,31	Hasil survey kepuasan masyarakat dari bagian organisasi setda
		Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	Persentase kinerja layanan kecamatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Laporan yang disusun adalah hasil dari aktivitas pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												ketentraman dan ketertiban umum, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	76,10	76.50	77,02	77,04	77,06	77,08	77,10	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Kota Pekalongan

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Pekalongan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Pekalongan. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Tabel III-2
Strategi Renstra PD

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik ⁷
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD, penerapan sistem merit, penguatan integritas ASN, serta pengembangan	Penguatan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi kinerja, integritas, manajemen talenta, transformasi arsitektur dan kolaborasi digital, BMD,	Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan partisipatif dan transparansi publik, pengelolaan layanan digital, mitigasi risiko	Penguatan tata kelola SDM, keuangan daerah, dan optimalisasi pengamanan BMD untuk mendukung Pembangunan infrastruktur	Optimalisasi perwujudan profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta perwujudan

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	literasi digital.	elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)	korupsi, pemutakhiran data dan optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan corporate university dalam pengembangan ASN yang mendukung perwujudan ekonomi sirkular dan Pembangunan yang berkelanjutan	daerah	single platform digital dalam rangka perwujudan Fondasi Mina Batik
Strategi Renstra OPD	Penguatan kualitas dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebagai instrumen utama untuk meningkatkan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	Transformasi sistem layanan publik berbasis teknologi informasi serta meningkatkan penguatan kondusivitas wilayah melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai modal utama pembangunan serta penguatan ekonomi berbasis masyarakat	Peningkatan kapasitas, kualitas, dan keberlanjutan sarana-prasarana yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.	Penguatan kapasitas masyarakat berdasarkan potensi wilayah

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan,

dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025 – 2029, maka perlu diperhatikan faktor – faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi kinerja dan pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:

A. Faktor Pendukung

1. Kepemimpinan Camat yang Visioner, Responsif, dan Kolaboratif

Camat berperan sebagai motor penggerak, koordinator, sekaligus pengambil keputusan strategis di tingkat wilayah. Kepemimpinan yang visioner, komunikatif, dan berorientasi pada pelayanan publik akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kinerja organisasi kecamatan. Gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi akan mendorong aparatur bekerja lebih efektif, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

2. Kompetensi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

Ketersediaan aparatur yang profesional, disiplin, dan memiliki kemampuan teknis serta digital menjadi faktor penting dalam implementasi program kecamatan. Pelatihan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan budaya kerja berorientasi hasil akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

3. Dukungan Anggaran dan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan

Implementasi Renstra memerlukan dukungan anggaran yang memadai melalui APBD Kota Pekalongan, Dana Kelurahan, serta program lintas perangkat daerah. Sinkronisasi kebijakan antara Kecamatan, Bappeda, dan OPD teknis lainnya menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai target Renstra.

4. Partisipasi Aktif Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Pelibatan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, serta organisasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) meningkatkan rasa memiliki terhadap program pemerintah. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi instrumen penting dalam menjaring aspirasi masyarakat agar program benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.

5. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi menjadi kunci modernisasi pelayanan kecamatan, baik melalui transformasi digital, penyederhanaan prosedur, maupun penyediaan layanan cepat dan transparan. Beberapa inovasi dalam pelayanan public yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara yaitu SiLancar dan DIGIZTUNT memperkuat akses layanan bagi masyarakat.

6. Sinergi dan Kolaborasi Antar Lembaga

Keberhasilan Renstra sangat bergantung pada sinergi antara kecamatan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor memudahkan mplementasi program prioritas seperti penanggulangan rob, pengelolaan lingkungan pesisir, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Pembiayaan

Anggaran operasional kecamatan masih relatif terbatas dibandingkan dengan cakupan kewenangan dan permasalahan wilayah. Sebagian besar program strategis masih bergantung pada dukungan APBD Kota Pekalongan dan dana kelurahan, yang tidak selalu mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan prioritas.

2. Rendahnya Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pelayanan

Implementasi inovasi pelayanan publik masih terbatas pada beberapa jenis layanan, dan belum terintegrasi antar-kelurahan. Sarana dan prasarana teknologi (komputer, jaringan internet, sistem data) di beberapa kelurahan belum memadai.

3. Permasalahan Lingkungan dan Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Pekalongan Utara merupakan wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap banjir rob, intrusi air laut, penurunan tanah, dan pencemaran lingkungan. Kondisi ini sering menyebabkan gangguan terhadap aktivitas pelayanan, infrastruktur rusak, dan beban tambahan bagi masyarakat serta pemerintah.

4. Keterbatasan Data dan Basis Informasi Pembangunan

Belum semua kelurahan memiliki sistem data pembangunan yang lengkap, terintegrasi, dan mutakhir. Data sosial-ekonomi, lingkungan, serta data spasial wilayah pesisir sering tidak sinkron antara satu instansi dengan lainnya.

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Masih Rentan

Sebagian masyarakat di wilayah pesisir Pekalongan Utara masih tergolong berpendapatan rendah dan bekerja di sektor informal. Ketergantungan pada sektor perikanan dan industri rumahan menyebabkan masyarakat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan bencana alam.

Tabel III-3
Arah Kebijakan Renstra PD

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penguatan kelembagaan, profesionalitas ASN, regulasi yang tepat fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta peningkatan	Mengoptimalkan pelayanan publik melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan kolaborasi lintas sektor di tingkat Kota dan kecamatan dalam rangka	

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>pelayanan publik berbasis digital, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel</p>	<p>menciptakan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.</p>	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Uraian Program

Rencana program pembangunan di Kecamatan pekalongan Utara merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Utara.

Program Kecamatan Pekalongan Utara untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam program urusan dan non urusan sebagaimana berikut:

C. Program Urusan

Program urusan terdiri dari 4 (empat) program yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara sebesar 100 persen.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Fokus program adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan; pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu sebesar 100 persen;

persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen. Program ini juga untuk mendukung program delegasi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berupa Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat dan program desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan tim tanggap bencana dan program peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan bio gas, *hydro*, maupun tenaga surya dan program peningkatan operasional kader Posyandu.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kinerja trantibum wilayah utara sebesar 100 persen.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum wilayah utara sebesar 100 persen.

D. Program Non urusan

Program non urusan terdiri dari 1 (satu) program yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan perangkat daerah; administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah; administrasi kepegawaian perangkat daerah; administrasi umum perangkat daerah; penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Indikator yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah sebesar 100 persen; persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen; persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel IV.1 sebagai berikut

Tabel IV-1
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subke giatan	Outcome/ Output	Indikator	Satua n	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas layanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	persen	100 persen	100 persen	100 persen	9.700.000	100 persen	13.590.000	100 persen	13.590.000	100 persen	17.400.000	100 persen	18.500.000	
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Tercapainya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang optimal	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persen	100 persen	100 persen	100 persen	6.964.000	100 persen	9.130.000	100 persen	9.130.000	100 persen	12.500.000	100 persen	13.000.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tepat waktu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	6.964.000	2 laporan	9.130.000	2 laporan	9.130.000	2 laporan	12.500.000	2 laporan	13.000.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	persen	100 persen	100 persen	100 persen	2.736.000	100 persen	4.460.000	100 persen	4.900.000	100 persen	5.500.000	100 persen	5.500.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2.736.000	4 laporan	4.460.000	4 laporan	4.460.000	4 laporan	4.900.000	4 laporan	5.500.000	
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Terwujudnya ketepatan waktu penyelesaian laporan kinerja pemberdayaan oleh kelurahan pada Kecamatan Pekalongan Utara	Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100 persen	100 persen	100 persen	82.132.000	100 persen	79.156.000	100 persen	88.570.000	100 persen	99.611.000	100 persen	113.280.000	
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Tercapainya penyelenggara lembaga kemasyarakatan yang efektif dan tepat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	persen	100 persen	100 persen	100 persen	37.306.000	100 persen	37.306.000	100 persen	41.220.000	100 persen	48.261.000	100 persen	56.500.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	sasaran	Kecamatan yang dilaksanakan														
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tercapaiannya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang efektif dan tepat sasaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	lkk	3 lkk	3 lkk	4 lkk	37.306.000	4 lkk	41.220.000	4 lkk	48.261.000	4 lkk	56.500.000	4 lkk	56.500.000	
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Tercapaiannya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang tepat sasaran	Persentase kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	persen	100 persen	100 persen	100 persen	44.826.000	100 persen	41.850.000	100 persen	47.350.000	100 persen	51.350.000	100 persen	56.780.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	keluarga	2400 keluarga	1800 keluarga	400	44.826.000	410	41.850.000	420	47.350.000	430	51.350.000	440	56.780.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kinerja trantibum wilayah utara	Persentase Kinerja Trantibum Wilayah Utara	persen	100 persen	100 persen	100 persen	262.350.000	100 persen	260.730.000	100 persen	301.540.000	100 persen	404.630.000	100 persen	404.630.000	
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang optimal	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			100 persen	100 persen	262.350.000	100 persen	260.730.000	100 persen	301.540.000	100 persen	404.630.000	100 persen	404.630.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan secara tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12 laporan	11 laporan	11 laporan	262.350.000	11 laporan	260.730.000	11 laporan	301.540.000	11 laporan	404.630.000	11 laporan	404.630.000	
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.970.000	100 persen	4.970.000	100 persen	5.625.000	100 persen	6.256.000	100 persen	6.256.000	
Penyelenggaraan	Tercapainya	Persentase ketercapaian	persen	100 persen	100 persen	100 persen	4.970.000	100 persen	4.970.000	100	5.625.000	100	6.256.000	100 persen	6.256.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					(3)	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah								persen	0	persen	0		0	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan tepat waktu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.970.000	1 dokumen	4.970.000	1 dokumen	5.625.000	1 dokumen	6.256.000	1 dokumen	6.256.000	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah di kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Wilayah Utara	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100 persen	100 persen	100 persen	9.695.550.000	100 persen	9.559.348.000	100 persen	9.544.791.000	100 persen	9.881.623.000	100 persen	9.945.386.000	
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100 persen	100 persen	100 persen	112.396.000	100 persen	120.554.000	100 persen	120.554.000	100 persen	123.016.000	100 persen	121.554.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1.899.000	2 dokumen	1.899.000	2 dokumen	2.668.000	2 dokumen	4.089.000	2 dokumen	2.668.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan															
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.927.000	2 dokumen	1.886.000	2 dokumen	1.927.000	2 dokumen	1.886.000	2 dokumen	1.886.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	108.570.000	15 laporan	116.000.000	15 laporan	117.000.000	15 laporan	117.000.000	15 laporan	117.000.000	
Administrasi keuangan perangkat daerah	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100 persen	100 persen	100 persen	8.173.770.000	100 persen	7.786.584.000	100 persen	7.786.584.000	100 persen	7.853.459.000	100 persen	7.853.459.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya penyampaian	Jumlah Orang yang Menerima	orang	62 orang	70 orang/bulan	63 orang/bulan	7.976.084.000	63 orang/bul	7.590.684.000	63 orang/	7.590.684.000	63 orang/b	7.657.559.000	63 orang/bul	7.657.559.000	

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
ASN	gaji tunjangan ASN yang tepat waktu	Gaji dan Tunjangan ASN						an		bulan		ulan		an		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	195.900.000	12 dokumen	195.900.000	12 dokumen	195.900.000	12 dokumen	195.900.000	12 dokumen	195.900.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang akuntabel dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1 laporan	1 dokumen	1 laporan	1.786.000	1 laporan	1.786.000	1 laporan	1.786.000	1 laporan	1.786.000	1 laporan	1.786.000	
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Wilayah Utara	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang	persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.162.731.000	100 persen	1.204.789.000	100 persen	1.322.297.000	100 persen	1.535.917.000	100 persen	1.535.017.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					(3)	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
		Urusan Pemerintah Daerah														
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100 persen	100 persen	100 persen	3.825.000	100 persen	7.300.000	100 persen	10.000.000	100 persen	12.000.000	100 persen	10.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1 paket	1 paket	1 paket	3.825.000	1 paket	7.300.000	1 paket	10.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	10.000.000	
Administrasi umum perangkat daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100 persen	100 persen	100 persen	267.523.000	100 persen	307.252.000	100 persen	413.480.000	100 persen	627.100.000	100 persen	628.200.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4 paket	4 paket	4 paket	6.175.000	4 paket	6.775.000	4 paket	7.500.000	4 paket	8.600.000	4 paket	8.600.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan	paket	4 paket	4 paket	4 paket	86.000.000	4 paket	99.000.000	4 paket	128.248.000	4 paket	332.300.000	4 paket	332.300.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Kantor	yang di butuhkan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang cukup dan memadai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4 paket	4 paket	4 paket	5.140.000	4 paket	1.140.000	4 paket	7.875.000	4 paket	10.500.000	4 paket	10.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang memadai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4 paket	4 paket	4 paket	131.808.000	4 paket	139.362.000	4 paket	201.082.000	4 paket	205.800.000	4 paket	205.800.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang memadai dan sesuai dengan kelembagaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4 paket	13 paket	13 paket	18.400.000	13 paket	30.300.000	13 paket	40.000.000	13 paket	40.000.000	13 paket	40.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15.000.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	17.500.000	12 laporan	19.000.000	12 laporan	19.000.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai ketentuan	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persn	100 persen	100 persen	100 persen	891.383.000	100 persen	890.237.000	100 persen	896.817.000	100 persen	896.817.000	100 persen	896.817.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	5.000.000	4 laporan	7.670.000	4 laporan	10.500.000	4 laporan	10.500.000	4 laporan	10.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	140.184.000	12 laporan	140.184.000	12 laporan	140.184.000	12 laporan	145.934.000	12 laporan	143.934.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	746.199.000	12 laporan	742.383.000	12 laporan	742.383.000	12 laporan	742.383.000	12 laporan	742.383.000	
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					(3)	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	daerah di Wilayah Utara															
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	100.000.000	0	0	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pengadaab Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tepat dan efisien	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	100.000.000	0	0	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	persen	100 persen	100 persen	100 persen	246.653.000	100 persen	386.918.000	100 persen	313.570.000	100 persen	434.320.000	100 persen	333.570.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Terselenggaranya pemeliharaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	persen	37 unit	37 unit	37 unit	149.803.000	37 unit	149.803.000	37 unit	165.570.000	37 unit	185.570.000	37 unit	185.570.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tepat dan efisien	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	14 unit	12 unit	12 unit	64.000.000	11 unit	192.115.000	12 unit	153.000.000	11 unit	203.750.000	11 unit	103.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tepat dan efisien	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	119 unit	75 unit	75 unit	32.850.000	75 unit	45.000.000	75 unit	45.000.000	75 unit	45.000.000	75 unit	45.000.000	
KELURAHAN KANDANG PANJANG																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Persentase Kelurahan yang menyelesaikan	persen	100 persen	100 persen	100 persen	737.018.000	100 persen	477.361.000	100 persen	515.171.000	100 persen	536.234.000	100 persen	536.234.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
KELURAHAN	masyarakat pada Kelurahan Kandang Panjang	an laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu														
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang efektif dan tepat sasaran	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	persen	100 persen	100 persen	100 persen	737.018.000	100 persen	477.361.000	100 persen	515.171.000	100 persen	536.234.000	100 persen	536.234.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lkk	7 lkk	7 lkk	7 lkk	42.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	16	10	3	332.256.000	3	134.256.000	3	138.256.000	3	140.580.000	3	145.900.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pokmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	pokmas	9 pokmas	9 pokmas	9 pokmas	362.262.000	9 pokmas	330.605.000	9 pokmas	346.348.000	9 pokmas	362.091.000	9 pokmas	377.834.000	

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	dan Ormas secara optimal	di Kelurahan														
KELURAHAN PANJANG WETAN																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Panjang Wetan	Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100	100	100	511.250.000	100 persen	538.850.000	100 persen	565.127.000	100 persen	592.130.000	100 persen	592.130.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang efektif dan tepat sasaran	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	persen	100	100 persen	100 persen	541.250.000	100 persen	538.850.000	100 persen	565.127.000	100 persen	592.130.000	100 persen	592.130.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lkk	7	7 lkk	7 lkk	42.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		8 unit	5 unit	135.350.000	6 unit	144.800.000	6 unit	152.000.000	7 unit	159.600.000	7 unit	159.600.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	tepat sasaran															
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pokmas dan Ormas secara optimal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	9	9 pokmas	9 pokmas	363.400.000	10 pokmas	381.550.000	10 pokmas	400.627.000	10 pokmas	420.030.000	10 pokmas	420.030.000	
KELURAHAN DEGAYU																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Degayu	Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	Persen	100	100 persen	100 persen	414.350.000	100 persen	434.181.000	100 persen	454.170.000	100 persen	474.044.000	100 persen	474.044.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang efektif dan tepat sasaran	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persen	100	100 persen	100 persen	414.350.000	100 persen	434.181.000	100 persen	454.170.000	100 persen	474.044.000	100 persen	474.044.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lkk	7	7 lkk	7 lkk	42.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					(3)	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	yang optimal	Kelurahan														
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	6	2	3 unit	420.619.000	3 unit	126.650.000	3 unit	132.700.000	3 unit	138.800.000	3 unit	144.750.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pokmas dan Ormas secara optimal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	10	10 pokmas	10 pokmas	261.450.000	10 pokmas	273.900.000	10 pokmas	286.400.000	10 pokmas	298.800.000	10 pokmas	298.800.000	
KELURAHAN BANDEGAN																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Bandengan	Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100	100 persen	100 persen	410.356.000	100 persen	347.722.000	100 persen	354.888.000	100 persen	362.054.000	100 persen	369.220.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang efektif dan tepat sasaran	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	persen	100	100 persen	100 persen	410.356.000	100 persen	347.722.000	100 persen	354.888.000	100 persen	362.054.000	100 persen	369.220.000	
Peningkatan	Terlaksananya Partisipasi	Jumlah Lembaga	lkk	7	7 lkk	7 lkk	42.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
					(3)	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2 unit	3 unit	3 unit	118.684.000	3 unit	129.804.000	3 unit	129.804.000	3 unit	135.364.000	3 unit	140.924.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pokmas dan Ormas secara optimal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	9	9 pokmas	9 pokmas	249.172.000	9 pokmas	210.978.000	9 pokmas	212.584.000	9 pokmas	214.190.000	9 pokmas	215.796.000	
KELURAHAN KRAPYAK																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Krapyak	Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100	100 persen	100 persen	898.149.000	100 persen	650.531.000	100 persen	682.433.000	100 persen	715.930.000	100 persen	751.101.000	
Kegiatan Pemberdayaan	Tercapainya	Persentase ketercapaian	persen	100	100 persen	100 persen	898.149.000	100 persen	638.031.000	100 persen	669.933.000	100 persen	703.430.000	100 persen	738.601.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Kelurahan	kegiatan pemberdayaan kelurahan yang efektif dan tepat sasaran	n pemberdayaan kelurahan														
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lkk	7	7 lkk	7 lkk	42.500.000	7 lkk	13.125.000	7 lkk	13.781.000	7 lkk	14.470.000	7 lkk	15.194.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	23	16 unit	3 unit	301.197.000	3 unit	130.632.000	3 unit	136.864.000	3 unit	144.407.000	3 unit	152.277.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pokmas dan Ormas secara optimal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	10	10 pokmas	10 pokmas	554.452.000	10 pokmas	494.274.000	10 pokmas	519.288.000	10 pokmas	544.553.000	10 pokmas	571.130.000	
KELURAHAN PADUKUHAN KRATON																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas	Persentase Kelurahan yang	persen	100	100 persen	100 persen	648.955.000	100 persen	479.1.000	100 persen	501.807.000	100 persen	516.133.000	16.623.266.400	530.459.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Padukuhan Kraton	menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu														
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang efektif dan tepat sasaran	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	persen	100	100 persen	100 persen	648.955.000	100 persen	479.1.000	100 persen	501.807.000	100 persen	516.133.000	16.623.266.400	530.459.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lkk	7	7 lkk	7 lkk	42.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	7 lkk	12.500.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	12	6	4	219.546.000	4 unit	129.546.000	4 unit	145.18.000	5 unit	153.006.000	5 unit	160.836.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	pokmas	9	9 pokmas	9 pokmas	386.909.000	9 pokmas	337.615.000	9 pokmas	344.121.000	9 pokmas	350.627.000	9 pokmas	357.133.000	

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)			(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	oleh Pokmas dan Ormas secara optimal	Masyarakat di Kelurahan														
KELURAHAN PANJANG BARU																
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat pada Kelurahan Padukuhan Kraton	Persentase Kelurahan yang menyelesaikan laporan kinerja pemberdayaan tepat waktu	persen	100	100 persen	100 persen	502.172.000	100 persen	451.050.000	100 persen	473.802.000	100 persen	497.282.000	100 persen	522.146.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang efektif dan tepat sasaran	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	persen	100	100 persen	100 persen	502.172.000	100 persen	451.050.000	100 persen	473.802.000	100 persen	497.282.000	100 persen	522.146.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang optimal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lkk	7	7 lkk	7 lkk	42.500.000	7 lkk	13.125.000	7 lkk	13.781.000	7 lkk	14.470.000	7 lkk	15.193.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	14	5 unit	2 unit	123.586.000	3 unit	129.546.000	3 unit	136.253.000	3 unit	143.066.000	3 unit	150.219.000	

Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/ Output	Indikator	Satuan	Baseline		Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	Target	Pagu.	
(1)	(2)		(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	tepat sasaran															
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pokmas dan Ormas secara optimal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	9 pokmas	9 pokmas	9 pokmas	336.086.000	9 pokmas	308.160.000	9 pokmas	323.568.000	9 pokmas	339.746.000	9 pokmas	356.734.000	

4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV-2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik	<p>Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p>	Kecamatan Pekalongan Utara
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	<p>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</p>	Kecamatan Pekalongan Utara

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	
			<p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	Kelurahan Kandang Panjang
			<p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	Kelurahan Panjang Wetan
			<p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah</p>	Kelurahan Degayu

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	
			<p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	Kelurahan Bandengan
			<p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	Kelurahan Krapyak
			<p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	Kelurahan Padukuhan Kraton

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p> <p>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	Kelurahan Panjang Baru
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	<p>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	Kecamatan Pekalongan Utara
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	<p>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>	Kecamatan Pekalongan Utara

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 Melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV-3
Indikator Utama Pembangunan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			N	I	H	I	L			

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada tabel IV-5 dibawah ini:

Tabel IV-4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase kinerja layanan kecamatan	persen	100	100	100	100	100	100	Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah

									Utara, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Utara, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara
2	Nilai SAKIP OPD	Nilai	76,50	77,02	77,04	77,06	77,08	77,10	Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Kota Pekalongan

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV-5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			N	I	H	I	L			

4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-6
Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				N	I	H	I	L		

4.8 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 yang Mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV-7
Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				N	I	H	I	L		

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2025-2029 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Pekalongan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Utara setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan.


Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan dalam masa transisi maka dalam penyusunan Renstra ini telah ditambahkan rancangan program transisi satu program indikatif untuk 1 (satu) tahun ke depan sebagai pedoman/rujukan dan landasan hukum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan pada akhir periode Renstra. Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan

Utara ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Renstra Kecamatan Pekalongan Utara diharapkan dapat memberikan gambaran perencanaan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan


CAMAT PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN
WISMO ADITIYO, S.Pt., M.T
Pembina Tk.1
NIP. 19710926 1999903 1 006